

**MANAJEMEN STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

Firdausi Nuzulla Isnainy

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

firdausi.19104@mhs.unesa.ac.id

Trenda Aktiva Oktariyanda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Abstrak

Pada pemilu tahun 2019, ada sebanyak 34% keterwakilan perempuan menduduki kursi DPRD Kota Surabaya. Namun, dari ke-5 daerah pemilihan di Kota Surabaya, daerah pemilihan Surabaya 5 memiliki tingkat keterwakilan perempuan terpilih yang paling sedikit, yaitu dari 10 anggota dewan yang terpilih hanya ada 1 anggota perempuannya, yang berasal dari PDI Perjuangan. Melihat hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang manajemen strategi pemenangan calon anggota DPRD perempuan dalam pemilu Kota Surabaya tahun 2019 (studi kasus pada PDI Perjuangan di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya), dengan menggunakan konsep manajemen strategi menurut Fred R. David yang terdiri dari 3 variabel, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan, untuk teknik pengambilan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa alternatif strategi yang berhasil dirumuskan dan diimplementasikan oleh caleg, Bapillu maupun DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Namun, ada pula alternatif strategi yang kurang maksimal dalam pengimplementasiannya. Sehingga, untuk ke depannya dibutuhkan pemetaan, dan perhitungan kembali terhadap suara masyarakat, serta analisis terhadap daerah pemilihan yang dituju sebagai bagian dari strategi dalam memenangkan calon anggota DPRD perempuan Kota Surabaya di periode mendatang.

Kata Kunci: manajemen strategi, strategi pemenangan caleg, dan caleg perempuan.

Abstract

In the 2019 general election, there were as many as 34% of women's representation occupying the seats of the Surabaya City DPRD. However, of the 5 electoral districts in the City of Surabaya, the Surabaya electoral district 5 has the least representation of women elected, namely out of 10 members of the council elected there are only 1 female member, who comes from the PDI P. Seeing this, the purpose of this study is to analyze and describe the management strategy for the winning of female DPRD candidates in the 2019 Surabaya City general election (case study on PDI-P in electoral district 5, Surabaya City), with using the concept of strategic management according to Fred R. David (in Taufiqurokhman, 2016) which consists of 3 variables, namely strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Meanwhile, the data collection technique is done through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study, namely data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions/data verification. Based on the results of the research, there are several alternative strategies that have been successfully formulated and implemented by the candidates for legislative members, Bapillu and the DPC PDI-P Surabaya. However, there are also alternative strategies that are less than optimal in their implementation. So that, in the future mapping and recalculation of public votes is needed, as well as an analysis of the targeted electoral districts as part of the strategy in winning the candidates for women DPRD members for the City of Surabaya in the coming period.

Keywords: strategy management, strategies for winning legislative candidates, and female legislative candidates.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, peran dan partisipasi perempuan dalam dunia politik praktis telah dibuktikan melalui kebijakan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Sukiada (2017: 17) berpendapat bahwa, perempuan sebagai legislator diharapkan mampu menciptakan inovasi baru dan memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perempuan sebagai legislator diharapkan mampu menghapus stigma legislatif yang sering dihadapkan dengan berbagai skandal yang dibuat oleh oknum anggota legislatif itu sendiri. Aktifnya perempuan di ranah politik tentu sangat membantu masa depan perempuan, karena semakin banyak anggota parlemen perempuan yang ikut berpartisipasi, maka semakin besar kemungkinan isu-isu perempuan seperti pendidikan, kesehatan, reproduksi, perlindungan kerja, dan lain sebagainya dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan publik. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Ibu Hj. Siti Mariyam selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa:

“Perjuangan hak-hak perempuan harus dilakukan oleh kita sendiri sebagai perempuan. Apalagi, banyak kasus di lapangan yang menunjukkan angka kematian seorang perempuan atau ibu dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu kanker. Namun, sampai saat ini belum ada anggaran maksimal yang menyentuh permasalahan ini. Oleh sebab itu, dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi hal yang penting, terutama untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan.” (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.45 WIB).

Implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di kursi legislatif telah dilaksanakan untuk keempat kalinya di Indonesia. Menurut Abdurrachman, Majestya, and Riyanti, (2020: 468- 469), peraturan bersejarah ini dimulai dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 65 ayat (1), yang mengharuskan partai politik peserta Pemilu untuk memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada saat mengajukan calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peraturan ini mengalami beberapa kali perubahan regulasi, yang artinya hal ini menandai adanya perkembangan representasi politik perempuan.

Dimulai dari Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2003, 2008, 2012 hingga yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk aturan mengenai kebijakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan tidak mengalami perubahan. Ini menandakan bahwa peran administrasi negara sebagai *policy making* berhasil menciptakan berbagai regulasi di Indonesia, khususnya dalam memberikan jaminan dan kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik sesuai prinsip kesetaraan *gender*.

Hal ini kemudian dibuktikan dengan besarnya peran anggota legislatif perempuan DPR RI periode 2004-2009 dalam memproduksi 11 UU Responsif *Gender*, termasuk di antaranya UU Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Venny (dalam Budiatri, 2012: 20). Fakta ini kemudian juga dibenarkan oleh Ibu Siti Mariyam selaku Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa:

“Benar sekali. Menurut saya, saat ini kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan adalah sama. Dan Alhamdulillah suara-suara perempuan juga lebih dominan. Mengapa? karena mereka (perempuan) bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan tahu tentang situasi, serta kondisi yang ada. Sehingga, sudah tidak ada lagi yang istilahnya ketimpangan *gender* di dunia politik.” (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.10 WIB).

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan umum tahun 2019, artinya secara tidak langsung mengharuskan setiap partai politik untuk mengikutsertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuannya pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyusun manajemen strateginya dalam memenangkan calon perempuannya tersebut. Berbagai manajemen strategi telah disusun dan diimplementasikan, sehingga kabar baiknya pada pemilihan legislatif tahun 2019 menghasilkan keterwakilan perempuan tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia. Berikut ini rinciannya:

Tabel 1. Persentase Perempuan di 3 Periode Terakhir

	DPR RI	DPRD Jawa Timur	DPRD Kota Surabaya
2009-2014	18,2%	17%	30%
2014-2019	17,32%	15%	34%
2019-2024	20,5%	17,50%	34%

Sumber : kpujatim.go.id (2020), KPU (2019), dan KPU (2014)

Pencapaian 20,5% (dua puluh koma lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) kuota keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 telah dianggap cukup memuaskan. Abdurrachman et al. (2020: 464). Peningkatan persentase keterwakilan perempuan tidak hanya dirasakan oleh DPR RI saja, DPRD Jawa Timur pun ikut merasakannya. Sedangkan, untuk DPRD Kota Surabaya mengalami konsistensi persentase perempuan seperti pada periode sebelumnya.

Peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik melalui kebijakan *affirmative* juga dirasakan oleh Republik Sudan Selatan. Menurut Edward (2014: 29), dimana pada tahun 2013 jumlah perempuan meningkat secara signifikan, dan harus diakui bahwa meskipun 25% (dua puluh lima persen) belum terpenuhi secara maksimal, namun kebijakan *affirmative* bagi perempuan ini telah meningkatkan jumlah perempuan maupun partisipasi politik perempuan di parlemen maupun di posisi penting lainnya di Republik Sudan Selatan.

Di sisi lain, Peter and Uzoma Iteogu (2021: 2017) juga menjelaskan bahwa, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat Nigeria untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik. Sejalan dengan deklarasi pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995 yang menganjurkan 30% (tiga puluh persen) kebijakan *affirmative action*, kebijakan Gender Nasional di Nigeria merekomendasikan 35% (tiga puluh lima persen) untuk representasi perempuan yang lebih inklusif dalam politik. Sejak tahun 1999 pemerintahan di Nigeria menjadi demokratis, dan terjadi peningkatan partisipasi politik perempuan di Nigeria.

Berdasarkan pernyataan diatas, berbagai negara tentu telah menerapkan kebijakan *affirmative* maupun kebijakan keterwakilan perempuan di ranah politik. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik, tentu dibutuhkan manajemen strategi di dalam prosesnya. Baik itu pada proses analisis, perumusan, maupun implementasi strategi tersebut. Karena, strategi ini nantinya akan berisi rencana yang akan dilaksanakan melalui serangkaian komitmen, dan tindakan yang tertata, serta terkoordinasi dengan baik guna mencapai hasil yang diinginkan.

Strategi yang efektif memungkinkan untuk memanfaatkan peluang dan membatasi ancaman di lingkungan eksternal yang ada (Quaye et al, 2015: 136). Namun menurut Tukiman, dkk (2018: 54) untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik

operasionalnya. Strategi yang efektif memungkinkan untuk memanfaatkan peluang dan dan membatasi ancaman di lingkungan eksternal yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut, Nawawi (2003: 145) juga menjelaskan bahwa, manajemen strategi dalam lingkungan pemerintahan sebagai sebuah paradigma baru yang saat ini telah diterapkan di hampir semua organisasi. Salah satunya, yaitu manajemen strategi di bidang politik. Khususnya dalam memenangkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan. Melalui peran administrasi negara, rangkaian proses manajemen strategi seperti pengembangan kebijakan hingga implementasi kebijakan dapat berhasil dicapai. Adanya pengamatan lingkungan eksternal dan internal di dalam partai politik juga berguna untuk menyesuaikan kebijakan apa atau strategi apa yang cocok untuk partai politik tersebut (Hadi, 2019: 70). Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa ada banyak manajemen strategi yang disusun oleh partai politik maupun kandidat perempuan guna memenangkan persaingan dalam pesta demokrasi ini, seperti:

Tabel 2. Manajemen Strategi Partai Politik dan Kandidat Perempuan Terpilih dalam Pileg

Judul dan Penulis	Strategi Politik
<p>“Strategi PDI Perjuangan dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Halmahera Barat”</p> <p>Fure, (2020: 6)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi mulai dari kader partai, ranting, serta anak ranting di desa-desa, dan para pemilih dikalangan masyarakat umum. 2. Membawa isu terkait keterwakilan kaum perempuan diparlemen dan pemberdayaan perempuan. 3. Pemasangan baliho, dan spanduk dipinggir-pinggir jalan raya, kalender caleg, serta kartu nama caleg.
<p>“Strategi Partai Gerindra dalam Mewujudkan Representasi Perempuan di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024”</p> <p>Wahyuni, (2021: 192)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kampanye politik. 2. Membagikan baju kaos partai dan kalender partai. 3. Sosialisasi dengan masyarakat daerah pemilihan. 4. Menyampaikan visi dan misi, serta program kerja partai dan caleg. 5. Komunikasi dan terlibat secara langsung dalam kegiatan sosial. 6. Strategi pendukung lainnya pada elektabilitas para calon legislatif perempuan, caleg <i>incumbent</i> dan Prabowo-Sandi <i>effect</i>.
<p>“Strategi Politik Para Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019”</p> <p>Inkirowang, Michael J. M. (2021: 8-9)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi ofensif, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan atau segmentasi. b. Pembentukan tim sukses. c. Pemanfaatan media. d. Interaksi langsung dengan masyarakat di dapil. e. Berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat. 2. Strategi defensive dengan melalui penguatan forum dapil/tim sukses.

Sumber : Data Olahan Penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dijelaskan bahwa banyak bentuk strategi yang diterapkan oleh partai politik maupun dari para kandidat perempuan calon legislatif. Mulai dari strategi yang bersifat umum seperti kampanye, pemasangan baliho dan spanduk, hingga strategi yang bersifat khusus, seperti mendekati masyarakat dengan gaya feminim, maupun mengangkat isu *gender* dan keterwakilan. Semua bentuk strategi politik tersebut dilakukan demi mendulang suara sah sebanyak-banyaknya.

Hal serupa pun tentu juga dilakukan oleh para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan Kota Surabaya. Menurut Purwanti (2016: 195), dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, persentasi tertinggi keterpilihan perempuan di DPRD kabupaten/kota secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur berada di Kota Surabaya sebanyak 17 orang (34%) dari 50 kursi yang tersedia. Berikut ini rinciannya:

Tabel 3. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019

Partai Politik	Daerah Pemilihan Kota Surabaya									
	1		2		3		4		5	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PKB	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-
Gerindra	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
PDI Perjuangan	2	1	1	2	3	-	2	1	2	1
Golkar	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
NasDem	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
PKS	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-
PSI	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
PAN	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Demokrat	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
PPP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	3	4	7	6	3	7	3	9	1
% Keterwakilan Perempuan	30%		64%		33%		30%		10%	
Laki-Laki = 33	Perempuan = 17				Total = 50					
34% Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Tempatnya										

Sumber : KPU, (2019)

Berdasarkan tabel 2 diatas menggambarkan bahwa dari ke lima daerah pemilihan di Kota Surabaya, daerah pemilihan Surabaya 5 (Asemrowo, Benowo, Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakem, Sambikerep, Tandes, dan Wiyung), memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang terpilih paling sedikit, yaitu dari 10 (sepuluh) anggota dewan yang terpilih hanya ada 1 (satu) anggota perempuannya, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). (KPU, 2019).

Padahal apabila dikaji lebih mendalam lagi, ada sebanyak 55 (lima puluh lima) calon perempuan yang diajukan oleh 16 (enambelas) partai politik di daerah pemilihan Surabaya 5 tersebut. (KPU, 2018). Namun, daerah pemilihan Surabaya 5 memiliki anggota dewan

perempuan terpilih yang paling sedikit dibanding dengan 4 daerah pemilihan lainnya di Kota Surabaya. (KPU, 2019). Hal ini tentunya menggambarkan bahwa, manajemen strategi yang diimplementasikan dan direalisasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dalam memenangkan calon perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, khususnya daerah pemilihan Surabaya 5 sangatlah strategis.

Oleh sebab itu, dengan melihat ada sebanyak 55 (lima puluh lima) calon perempuan dari 16 (enam belas) partai yang mengajukan calon perempuan di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya, dan yang terpilih hanya 1 (satu) yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), membuat peneliti ingin menganalisis manajemen strategi apakah yang diimplementasikan maupun direalisasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dalam memenangkan calon perempuannya tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana Manab, (2015: 4) menjelaskan bahwa, pendekatan deskriptif kualitatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara terstruktur, mengurutkannya berdasarkan ciri-ciri tertentu, dan menggambarkan atau mendeskripsikan data hasil wawancara yang diperoleh dari percakapan, observasi lapangan maupun dokumentasi, baik berupa foto, video, rekaman suara dan lain sebagainya. Kemudian, untuk analisis dalam artikel ilmiah ini menggunakan konsep manajemen strategik Fred R. David (dalam Taufiqurokhman, 2016: 17-18) yang meliputi: perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Adapun teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018: 125), *purposive sampling* merupakan teknik yang menggunakan pertimbangan khusus untuk memilih sampel. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pertama; Ibu Hj. Siti Mariyam selaku Anggota DPRD perempuan (Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat), yang terpilih dalam pemilu tahun 2019 di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya; kedua, Mas Akhmad Hidayat selaku Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tahun 2014-2019; ketiga, Bapak Anas Karno selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tahun 2014-2019; keempat, Bapak Agus Setiawan dan Ibu

Reny Wulan selaku warga daerah pemilihan 5 Kota Surabaya.

Di sisi lain, teknik pengambilan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, baik itu primer maupun sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018: 309). Penelitian ini juga dilengkapi dengan instrumen penunjang seperti pedoman wawancara, buku catatan dan alat komunikasi atau media digital seperti *handphone* atau kamera. Selanjutnya, untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Sugiyono (dalam Setiawan dan Badrudin, 2021: 413), yang menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara aktif, dan yang menjadi kunci utama penelitian ialah peneliti itu sendiri dengan tetap memperhatikan hubungan data satu dengan data lainnya, serta berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya jenuh. Rangkaian kegiatan dalam analisis data kualitatif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan umum Kota Surabaya tahun 2019 lalu, dapat dilihat pada tabel 2 diatas, menggambarkan bahwa dari ke-5 daerah pemilihan di Kota Surabaya, daerah pemilihan Surabaya 5 memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang terpilih paling sedikit, yaitu dari 10 (sepuluh) anggota dewan yang terpilih hanya ada 1 (satu) anggota perempuannya, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). (KPU, 2019). Ini artinya, perwakilan dewan perempuan dari PDI Perjuangan telah melakukan serangkaian proses manajemen strategi, salah satunya dengan merumuskan strategi dan mencari celah untuk lebih unggul dari kompetitornya. Selanjutnya dalam proses menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah ini, penulis menggunakan teori manajemen strategik Fred R. David, yang meliputi:

1. Perumusan Strategi

Proses perumusan manajemen strategik digambarkan melalui kondisi yang sedang berlangsung saat ini, inilah yang akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan, dan bagaimana cara mencapainya. Selain itu, Taufiqurokhman (2016: 28) juga menjelaskan bahwa, perumusan strategi harus berlandaskan pada pemahaman secara mendalam terhadap pasar, kompetisi, dan lingkungan eksternal. Adapun indikator-indikator dalam perumusan strategi, meliputi:

a. Mengembangkan visi dan misi partai politik

Berbicara mengenai visi dan misi, indikator ini adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh partai politik. Karena, menurut Taufiqurokhman (2016: 33), mengembangkan sebuah visi dan misi merupakan langkah pertama dalam perumusan strategi. Sejalan dengan penjelasan diatas, pembentukan dan pengembangan visi dan misi pun juga dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dalam mempersiapkan pemilu pada tahun 2019 di Kota Surabaya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Anas Karno selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dan memperoleh hasil bahwa:

“Visi dan misi dipilih, karena PDI Perjuangan ingin menuju dan mewujudkan Indonesia Raya. Sedangkan bentuk implementasinya, dimana setiap kader harus menguasai Hasta Prasetya untuk mencapai Indonesia Raya”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 10.15 WIB).

Proses pembentukan visi dan misi ini pun melibatkan kepengurusan dari tingkat partai politik pusat sampai ke tingkat anak ranting. Namun, untuk semua keputusan akan tetap ada di pimpinan partai pusat. Bahkan, dalam proses penyusunan visi dan misi bagi kadernya yang maju ke pesta demokrasi, PDI Perjuangan pasti terlibat dalam penyusunan visi dan misi para calonnya. Hal ini bertujuan agar para calon tidak gagal paham terhadap visi dan misi yang disusun.

Di sisi lain, wawancara juga dilakukan oleh penulis dengan Ibu Hj. Siti Mariyam selaku anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2019-2024, yang memperoleh hasil bahwa dalam pembentukan dan pengembangan visi dan misi, akan terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman, karena PDI Perjuangan merupakan partai modern. Selain itu, dalam proses pembentukan dan pengembangan visi dan misi partai juga memperhatikan beberapa hal, seperti visi dan misi ini nantinya harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi; harus berguna untuk mengambil keputusan dan tindakan partai; dapat digunakan untuk menentukan usaha dengan jelas; dan dapat menyatakan tujuan keseluruhan.

Proses penyampaian visi dan misi, slogan, maupun motto baik itu oleh partai politik maupun caleg dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut seperti sosialisasi di kampung-kampung, sosialisasi melalui kegiatan *outbond* dengan berkampanye, melalui program pemberdayaan perempuan dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, cara ini juga sebagai metode untuk menyerap aspirasi masyarakat.

b. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal

Identifikasi kondisi eksternal sangat dibutuhkan oleh partai politik. Taufiqurokhman, (2016: 34) menjelaskan bahwa, identifikasi lingkungan eksternal artinya melakukan aktivitas memonitor, dan mengevaluasi lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh terhadap pilihan strategi serta mendefinisikan kondisi kompetisinya. Hal ini pun berlaku bagi Ibu Siti Mariyam, dan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Keduanya harus cakup dalam hal menganalisis, dan memperhitungkan peluang serta ancaman secara matang, yang dapat berasal dari lingkungan maupun lawan partai politiknya.

Oleh sebab itu, apabila indikator ini dikaitkan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Hj. Siti Mariyam. Maka diperoleh hasil, bahwa peluang yang diciptakan Ibu Siti Mariyam adalah dengan menarik simpati dan suara masyarakat dengan memenuhi keperluan perlengkapan maupun peralatan organisasi maupun desa. Bermanfaatnya caleg bagi masyarakat, secara tidak langsung menciptakan peluang bagi caleg, bahwa masyarakat sendirilah yang akan mengkampanyekan dan memilih si caleg tersebut. Sama halnya dengan pernyataan Ibu Siti Mariyam. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Anas Karno, dimana diperoleh keterangan bahwa:

“Peluang yang diciptakan PDI Perjuangan adalah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai faktor, seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana.” (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 10.20 WIB).

Kebutuhan masyarakat yang dimaksudkan diatas adalah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana di kampung-kampung, memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu untuk bersekolah, menebus ijazah yang ditahan akibat tidak mampu membayar sekolah, dan memberikan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan administrasi pasien agar dapat keluar dari rumah sakit. Di sisi lain apabila ada peluang, maka akan ada pula ancaman. Menurut Mas Akhmad Hidayat selaku Wakil Kepala Bappilu DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang juga menambahkan, bahwa:

“Ancaman yang dirasakan hingga saat ini adalah masyarakat yang kurang percaya dengan program maupun bantuan yang diberikan oleh caleg maupun partai; masyarakat yang selalu menganggap bahwa caleg dan partai hanya melakukan pencitraan saja, karena mendekati pesta demokrasi; serta program caleg maupun partai yang dikampanyekan hanya dianggap sebagai janji

palsu oleh masyarakat”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 14.55 WIB).

Oleh sebab itu, Mas Akhmad berpendapat bahwa ancaman-ancaman seperti yang telah disebutkan diatas, hingga saat ini memang masih ada. Sampai sejauh ini, cara caleg dan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyelesaikannya yaitu dengan tetap terjun kemasyarakat, membantu serta meyakinkan masyarakat bahwa PDI Perjuangan memang ada dan benar-benar ingin membantu dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga, sampai sejauh ini ancaman dapat terkontrol dengan aman.

Upaya untuk mengatasi ancaman tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya membuktikan dengan memberikan bantuan dan beasiswa pendidikan, membantu administrasi dan biaya rumah sakit warga Kota Surabaya, dan memberikan bantuan bagi warga Kota Surabaya yang kurang mampu, dan masih banyak lagi lainnya. Sehingga tanpa *money politik*, masyarakat dapat secara sukarela memberikan suaranya.

c. Menentukan kekuatan dan kelemahan internal

Lingkungan internal berkaitan dengan seluruh unsur maupun hal yang ada di dalam partai politik. Taufiqurokhman, (2016: 46) menjelaskan bahwa di dalam proses perumusan strategi, partai politik juga perlu melakukan identifikasi dan evaluasi secara internal. Hasil dari identifikasi maupun evaluasi tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan tentang kekuatan maupun kelemahan partai. Partai politik pun dengan mudah dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menyikapi kekuatan, dan dapat mengantisipasi kelemahan partai secepat mungkin.

Apabila penjelasan tersebut dikaitkan dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, maka diperoleh hasil bahwa:

“Kekuatan partai secara otomatis akan terbentuk pada saat menjelang pesta demokrasi. Para kader partai akan saling bergotong-royong membantu meringankan anggaran pemilihan legislatif bagi caleg yang akan maju. Biasanya, para kader partai akan mengadakan iuran untuk membayar saksi, dan akan diganti apabila calon legislatif tersebut berhasil memenangkan pemilihan legislatif”. (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.25 WIB).

Di sisi lain, penilaian yang matang bagi bakal calon perempuan yang akan maju di pemilihan legislatif juga merupakan salah satu kekuatan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sistem penilaian ini seputar keterlibatan dan pengabdian si bakal caleg di dalam organisasi masyarakat, dan masih banyak lagi lainnya. Ini nantinya yang akan menambah skor bagi bakal

caleg yang didelegasikan untuk maju dalam pemilihan legislatif. Melalui serangkaian penilaian tersebut, tidak heran jika para caleg PDI Perjuangan yang maju selalu memiliki perwakilan dewan paling banyak dari pada partai lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Mas Akhmad Hidayat juga menambahkan bahwa, kekuatan partai dapat diciptakan melalui kader-kader PDI Perjuangan yang pemikirannya selalu *diupgrade* dengan seadil-adilnya, akuntabel, dan menjunjung tinggi integritasnya. Di sisi lain, untuk kelemahan partai menurut Bapak Anas Karno, bahwa:

“Sampai sejauh ini kelemahan yang ditemukan adalah mengenai rasa solid yang masih belum maksimal terbentuk di dalam DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sehingga, sering ditemui bahwa antar banteng/kader partai saling bertabrakan”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 10.25 WIB).

Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selalu mengadakan rapat evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat hasil kinerja para kader partainya. Selain itu untuk mengatasi kelemahan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya juga berusaha untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi para kader untuk dapat berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun keluh kesahnya demi kemajuan partai.

d. Membuat sejumlah strategi alternatif

Partai politik membutuhkan sejumlah strategi alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa sekarang maupun mendatang. Taufiqurokhman (2016: 33), mendefinisikan strategi sebagai keterampilan atau ilmu dalam memenangkan sebuah persaingan. Kondisi lingkungan, baik itu secara internal maupun eksternal akan selalu berubah atau dinamis, sehingga partai membutuhkan sejumlah strategi alternatif, dan hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hal yang sama pun dilakukan oleh para peserta pesta demokrasi, khususnya caleg dan partai politik. Para caleg dan partai politik menyiapkan berbagai strategi untuk memenangkan pesta demokrasi, tidak lupa sejumlah strategi alternatif lainnya juga disiapkan, untuk mengantisipasi apabila terdapat strategi yang gagal diterapkan. Apabila pernyataan diatas dikaitkan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, maka diperoleh hasil bahwa ada sejumlah strategi alternatif yang diimplementasikan oleh Ibu Siti, yaitu:

a). Kebermanfaatan caleg bagi masyarakat, karena dengan bermanfaatnya keberadaan caleg, maka

secara tidak langsung masyarakat sendiri yang akan mengkampanyekan caleg tersebut.

- b). Tidak membeli suara masyarakat, namun mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c). Bersosialisasi dan bercengkrama dengan milenial melalui *outbond*.
- d). Serta menjalin kerjasama di dalam internal partai, contohnya dengan memanfaatkan suara para kader partai, suara bakal calon yang tidak jadi, dan juga suara partai.

Di sisi lain, adapun sejumlah alternatif strategi yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan dalam menyambut pesta demokrasi. Dimana, berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Akhmad Hidayat, bahwa banyak alternatif strategi yang diimplementasikan dalam mendukung para caleg, seperti kebermanfaatan partai politik dimasyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat seperti dalam hal sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Hal yang sama pun disampaikan oleh Bapak Anas Karno selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dimana berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa:

“Adapun strategi lainnya yang diterapkan oleh DPC PDI Perjuangan adalah dengan melatih massa partai yang sudah militan, sudah loyal, dan sudah solid untuk dihubungkan dengan teknologi dan informasi agar dapat memperbesar peluang kemenangan”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 10.30 WIB).

Para kader partai dilatih untuk dapat memanfaatkan teknologi dan informasi, seperti dalam penggunaan media sosial, sehingga nantinya setiap program dan kegiatan dari para caleg maupun partai akan dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, para kader juga dilatih dalam penggunaan IT, editor video, sebagai jurnalis dan masih banyak lagi lainnya. Sehingga melalui ini nantinya, diharapkan dapat memperbesar peluang kemenangan.

e. Memilih strategi tertentu untuk digunakan

Banyaknya strategi alternatif yang dimiliki oleh partai politik tentu mengharuskan partai untuk memilah, dan menentukan strategi tertentu atau strategi unggulan yang akan digunakan. Taufiqurokhman, (2016: 34) berpendapat bahwa, strategi unggulan artinya rencana umum serta komprehensif atas semua aktivitas utama yang ditujukan pada usaha pencapaian sasaran dalam lingkungan yang bersifat dinamis.

Strategi unggulan, biasanya adalah strategi andalan yang diharapkan mampu untuk menghadapi lawan dan meraih kemenangan.

Apabila indikator ini dikaitkan dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, maka diperoleh hasil bahwa, pemilihan strategi yang tepat menurutnya adalah dengan strategi dari mulut ke mulut dengan orang terdekat. Strategi ini merupakan strategi unggulan yang dipilih oleh Ibu Siti, karena melalui orang terdekat dan tetangga yang mengkampanyekan Ibu Siti dari mulut ke mulut, Ibu Siti berhasil mendapatkan 2.000 (dua ribu) suara di daerah pemilihannya yaitu Surabaya 5. Sehingga mengantarkan Ibu Siti pada kemenangannya.

Pernyataan Ibu Siti ini pun dibenarkan oleh warga daerah pemilihan 5 Kota, yaitu Bapak Agus Setiawan yang menyatakan bahwa:

“Perolehan 2.000 (dua ribu) suara memang benar adanya. Ibu Siti sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di 5 Kota Surabaya, karena usaha beliau dalam membantu masyarakat yang kesulitan menghadapi administrasi rumah sakit, membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memiliki BPJS dan masih banyak lagi lainnya”. (Senin, 27 Desember 2021 Pukul 11. 37 WIB).

Upaya yang sama pun juga dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan. Dimana, berdasarkan wawancara dengan Bapak Anas Karno, diperoleh hasil bahwa:

“Bentuk alternatif strategi yang sering PDI Perjuangan Kota Surabaya implementasikan adalah dengan terjun secara langsung untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti membangun sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan bagi masyarakat”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 10.38 WIB).

2. Pelaksanaan Strategi

Tahap pelaksanaan atau implementasi strategi biasanya disebut juga dengan tahap tindakan. Taufiqurokhman (2016: 16), menjelaskan bahwa untuk mencapai sasaran dalam proses implementasi strategi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol. Adapun indikator-indikator dalam proses pelaksanaan strategi, yaitu:

a. Mengharuskan partai politik untuk menetapkan sasaran tahunan

Berbicara mengenai tujuan tahunan, sama halnya berbicara mengenai sasaran jangka pendek partai politik. Sasaran jangka pendek harus dicapai oleh suatu partai untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain

itu, penetapan tujuan tahunan merupakan aktivitas terstruktur yang secara langsung melibatkan seluruh pimpinan maupun pengurus di dalam partai politik. Fred R. David, (dalam Wiradika, 2018: 4). Penetapan sasaran tahunan tentunya juga berlaku bagi anggota DPRD Kota Surabaya dan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja keduanya sudah sampai sejauh mana. Oleh sebab itu, apabila indikator ini dikaitkan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, maka diperoleh hasil bahwa:

“Ada beberapa sasaran tahunan yang telah berhasil saya capai. Diantaranya melaksanakan pembangunan masjid di Lakarsantri Kelurahan Sumur Welut; mengalihkan tanah BKD se-Surabaya di Kedurus menjadi lapangan melalui rembug desa; mengupayakan tambahan tanah makam bagi warga; mengupayakan kesejahteraan buruh di Warugunung Karangpilang melalui pengangkatan karyawan tetap; dan mengupayakan perolehan asuransi Jasaraharja bagi buruh; serta warga mendapat ganti rugi akibat dampak dari debu truk proyek”. (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.30 WIB).

Di sisi lain, bukan hanya Ibu Siti saja yang memiliki sasaran tahunan. Bapak Anas Karno juga menyampaikan sasaran tahunan dari partai politik ini, salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan pendamping bagi masyarakat yang bertujuan untuk mendengar keluhan, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi tentunya menggunakan kemampuan intelektual.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa baik calon anggota DPRD maupun partai politik, yaitu PDI Perjuangan selalu menetapkan sasaran tahunanannya dengan sangat matang. Hal ini terbukti dari banyaknya program kesejahteraan masyarakat yang telah berhasil dicapai. Sasaran tahunan ini diharapkan dapat diukur, agar para pengurus maupun anggota partai politik mengetahui tingkat pencapaian kinerja individu maupun partai politik, sehingga nantinya dapat dievaluasi.

b. Membuat kebijakan

Salah satu unsur terpenting di dalam sebuah partai politik adalah kebijakan. Taufiqurokhman, (2016: 33) menjelaskan bahwa, kebijakan merupakan garis pedoman, aturan-aturan dan prosedur untuk mendukung usaha pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adanya kebijakan bertujuan untuk

mengarahkan manajemen strategi, karena kebijakan sendiri merupakan pedoman dalam melakukan tindakan. Apabila indikator kebijakan ini dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, maka diperoleh hasil bahwa:

“Di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ada kebijakan umum yang diberlakukan untuk meningkatkan pengetahuan, melatih *skill* dan memberdayakan para pengurus dan anggotanya, tanpa terkecuali bagi perempuan. Kebijakan ini adalah kaderisasi, yang memiliki beberapa tahapan di dalamnya seperti kader pemula, kader pratama dan lainnya”. (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.35 WIB).

Kaderisasi ini nantinya wajib diikuti oleh semua kader partai politik. Kebijakan kaderisasi ini dibuat dan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, dan harus diimplementasikan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan. Kebijakan ini berlaku bagi setiap masyarakat yang ingin bergabung menjadi kader PDI Perjuangan, baik itu kader pemula, pratama dan lainnya.

Di sisi lain, adapun kebijakan khusus yang diimplementasikan bagi kader partai politik yang akan maju sebagai calon anggota DPRD, dan ini berlaku secara umum, bukan hanya bagi perempuan saja. Kebijakan yang dimaksud ini adalah *compeer test* dan wajib untuk diikuti oleh para calon yang akan maju dalam pesta demokrasi. Hal yang sama pun dijelaskan oleh Bapak Anas Karno, dan Mas Akhmad Hidayat, dimana diperoleh hasil bahwa:

“*Compeer test* harus dan wajib diikuti oleh para calon legislatif dari PDI Perjuangan, karena merupakan hasil keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Selanjutnya, harus diimplementasikan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 12.13 WIB).

Compeer test ini seputar tes psikologi, wawancara, bentuk pengabdian si calon legislatif kepada masyarakat, dan keaktifan di dalam berorganisasi. Sehingga hasil skor dari *compeer test* inilah yang akan menambah bobot dalam susunan calon legislatif, dan secara tidak langsung kebijakan ini juga telah melatih para kader partai politik untuk turun langsung berdampingan dengan masyarakat.

c. Memotivasi kader partai politik

Motivasi memiliki peran penting dalam sebuah partai politik, sebab motivasi dapat mempengaruhi kinerja partai dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut David (2006: 186), motivasi sangat berkaitan erat dengan kompensasi, ini karena kompensasi yang tinggi, akan membuat kader partai bersemangat dalam bekerja, dan mengeluarkan semua yang dimiliki untuk mendapatkan hasil, dan tujuan yang diinginkan. Namun, yang perlu digaris bawahi, bahwa motivasi bukan hanya dapat direalisasikan dalam bentuk kompensasi saja, namun dapat pula melalui perhatian, pendengar yang baik, maupun kesempatan untuk berekspresi bagi para anggotanya.

Hal ini pun tentunya berlaku juga bagi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, diperoleh keterangan bahwa:

“DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selalu memberikan motivasi dan perhatian bukan hanya kepada perempuan yang akan maju sebagai calon legislatif saja. Motivasi dan perhatian ini juga diberikan kepada kader perempuan, seperti dengan menyelenggarakan peringatan Hari Ibu, dan Hari Kartini; serta menjadwalkan kegiatan *outbond* untuk membentuk pola *leadership*, ini semua merupakan bentuk nyata partai dalam memberikan *support* dan fasilitas kepada para kader perempuannya”. (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.37 WIB).

Bentuk kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu dimana DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya juga menyediakan wadah/organisasi kecil di dalam partai politik untuk meningkatkan pengetahuan, melatih *skill* dan memberdayakan perempuan, apalagi bagi perempuan yang akan maju sebagai calon anggota DPRD perempuan, diantaranya melalui ikatan pemberdayaan kader. Kader-kader perempuan ini nantinya akan dilatih dalam berorganisasi untuk memahami politik, dan memahami program-program pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Anas Karno membenarkan pernyataan diatas bahwa:

“Partai ini menyediakan wadah atau organisasi kecil untuk meningkatkan pengetahuan, melatih *skill* dan memberdayakan para kader perempuan, apalagi bagi kader perempuan yang akan maju sebagai calon anggota DPRD”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 15.40 WIB).

Wadah/organisasi ini direalisasikan melalui komunitas-komunitas dari departemen perempuan yang membidangi hal tersebut. Komunitas perempuan yang dimaksud ini adalah seperti komunitas sarinah, komunitas juang dan lain sebagainya. Dimana, para

kader dan caleg dilatih agar memiliki kesadaran politik, dan tanggungjawab. Selain membidangi urusan politik, komunitas perempuan ini berupaya agar menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi melalui wirausaha.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi pegawai tidak hanya dapat direalisasikan melalui pemberian kompensasi yang tinggi. Namun, dapat pula direalisasikan dengan memberikan peluang yang luas bagi para kader perempuan yang ingin maju sebagai calon legislatif, memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil dan berekspresi, dan memberikan penghargaan bagi para kader dan calon anggota legislatif perempuan yang memiliki *track record* memuaskan, serta menjadwalkan *family gathering* internal partai politik. Hal ini bertujuan agar terjalinnya hubungan kekeluargaan dan kerjasama, baik oleh para pimpinan maupun anggota partai politik. Selain itu, perhatian partai politik juga direalisasikan dalam bentuk pemberdayaan perempuan melalui wadah/organisasi kecil di dalam partai politik.

d. Mengalokasikan sumber daya

Berbicara mengenai alokasi sumber daya, Fred R. David (Wiradika, 2018: 4), menjelaskan bahwa alokasi sumber daya sendiri merupakan serangkaian kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategi berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya, agar dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan.

Lain halnya di bidang politik. Seperti yang diketahui, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan syarat untuk mengikuti pemilihan legislatif. Namun, seringkali masih ditemui adanya partai politik yang hanya asal *comot* kader perempuannya untuk dijadikan penggenap saja, agar lulus tahap administrasi dalam pesta demokrasi. Sejalan dengan pemaparan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mariyam, maka diperoleh hasil bahwa:

“Di DPC PDI Perjuangan memang benar ada yang seperti itu. Ada calon legislatif yang memang telah disiapkan, ditunjuk, dan siap secara pribadi untuk maju sebagai calon legislatif. Namun, apabila dalam daftar susunan calon belum memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka akan ada calon perempuan yang maju hanya untuk memenuhi kuota tersebut”. (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15. 40 WIB).

Adapun yang perlu digaris bawahi, walaupun DPC PDI Perjuangan melakukan hal tersebut, namun

diimbangi dengan meningkatkan pengetahuan, *skill* dan memberikan pelatihan bagi kader perempuannya yang maju tersebut. Usaha dalam memaksimalkan kemampuan calon legislatif tersebut dilakukan diberbagai bidang. Seperti dengan mengalokasikan dan mengikutseratakan si caleg di dalam beberapa organisasi lainnya, contohnya di Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan. Apalagi di PDI Perjuangan sistem *leadership* dan kepengurusannya berasal dari pusat sampai ke tingkat anak ranting dan ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Pernyataan Ibu Siti ini pun kemudian dibenarkan oleh Mas Akhmad Hidayat, yang memberi keterangan bahwa:

“Selain caleg yang kompeten, partai ini selalu berusaha memaksimalkan sumberdaya perempuan agar kompetitif. Usaha ini dilakukan melalui komunitas-komunitas perempuan yang ada, seperti komunitas sarinah, dan komunitas juang yang saat ini berupaya agar mereka menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi melalui wirausaha”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selalu berusaha menyiapkan dengan matang para calegnya yang akan maju. Namun apabila dihadapkan dalam situasi genting, maka sistem “*asal comot*” ini diberlakukan, ini terjadi di wilayah daerah pemilihan 1 Kota Surabaya, dimana kuota 30% (tiga puluh persen) perempuannya belum terpenuhi. Untuk kader perempuan yang “*asal comot*” ini tidak dibiarkan begitu saja, DPC PDI Perjuangan tetap membekali dengan memaksimalkan kader perempuan tersebut melalui wadah/organisasi partai, agar tetap kompetitif dalam mengikuti dan memenangkan pemilu.

e. Pengembangan budaya yang mendukung strategi

Budaya di dalam partai politik biasanya tumbuh dan dikembangkan oleh sumberdaya manusia yang bekerja di dalamnya. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Taufiqurokhman (2016: 54), yang juga menjelaskan bahwa budaya organisasi tumbuh menjadi nilai-nilai yang dipertahankan dan diturunkan kepada anggota baru. Nilai-nilai ini nantinya dapat dianggap sebagai ciri khas yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Budaya juga berperan penting untuk mendukung strategi dalam memenangkan calon anggota DPRD perempuan dalam pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber, maka diperoleh hasil

bahwa DPC PDI Perjuangan dan semua anak organisasi dibawahnya termasuk Bappilu menerapkan dan menjunjung tinggi budaya solidaritas dan egaliter. Solid merupakan setengah kemenangan dari partai ini. Selain itu, ada banyak kegiatan-kegiatan yang pro perempuan, pemberdayaan kader, dan pelatihan untuk pendamping guna mengasah gaya komunikasi dan kemampuan para kader. Partai ini juga melatih massa yang sudah militan, sudah loyal, dan sudah solid untuk dihubungkan dengan teknologi dan informasi agar dapat memperbesar peluang kemenangan.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya maupun kebiasaan di dalam partai politik harus bersifat membangun, karena budaya organisasi inilah yang nantinya akan menciptakan karakteristik pada sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya. Hal ini pun berlaku di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dimana bentuk budaya maupun kebiasaan yang diciptakan adalah dengan selalu meningkatkan rasa solidaritas dan egaliter di dalam partainya. Karena partai ini percaya, bahwa rasa solid yang tinggi merupakan setengah dari kemenangannya.

f. Pengarahan kembali usaha-usaha marketing politik

Ada dua variabel penting dalam indikator ini menurut Fred R. David (dalam Wiradika, 2018: 5). Pertama adalah kondisi lingkungan, dan yang kedua adalah pemosisian produk/program. Kondisi lingkungan bertujuan untuk menjangkau dan menganalisis lingkungan masyarakat. Sedangkan pemosisian produk/program, yaitu mencari tahu apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat. Intinya adalah mencari tahu sudut pandang masyarakat, bukan caleg maupun partai.

Apabila indikator ini dikaitkan dengan pemilu, maka usaha-usaha yang biasanya dilakukan oleh para calon legislatif, dan partai politik biasanya disebut dengan *marketing* politik. Ada visi dan misi, janji politik, serta program yang yang disuguhkan di dalam proses kampanye. *Marketing* politik ini tentunya juga menyuguhkan penawaran-penawaran program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan dengan indikator diatas, maka Ibu Hj. Siti Mariyam membenarkan hal tersebut, bahwa:

“Bentuk *marketing* politik yang saya implementasikan adalah melalui strategi dari mulut ke mulut orang terdekat dan tetangga, yang secara tidak langsung mengkampanyekan saya secara suka rela. Melalui hasil analisis lingkungan daerah pemilihan, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; bersosialisasi dan

bercengkrama dengan milenial melalui *outbond*; serta menjalin silaturahmi dengan masyarakat melalui organisasi kecil/kader yang ada. Dengan memenuhi kebutuhan dan mendengarkan keluhan msyarakat, ini merupakan strategi *marketing* politik yang lebih dapat diandalkan”. (Senin, 19 Agustus 2021 Pukul 15.42 WIB).

Hal tersebut kemudian didukung oleh pernyataan dari Mas Akhmad Hidayat. Dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh keterangan bahwa:

“Strategi *marketing* politik yang diimplementasikan oleh calon legislatif maupun PDI Perjuangan Kota Surabaya adalah sama, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendengarkan serta menyelesaikan keluhan, dan masalah yang masyarakat hadapi. Selain itu, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya juga selalu menampilkan kepada masyarakat saluran komunikasi pembangunan yang efektif”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 15.05 WIB).

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anas Karno diperoleh keterangan lainnya bahwa, tidak ada strategi *marketing* politik khusus yang diimplementasikan oleh partai, partai hanya menyiapkan secara global, misalnya kampanye akbar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, strategi pemasaran atau *marketing* politik memiliki peran penting dalam pemilu. Karena melalui ini, nantinya para calon legislatif dan partai politik berusaha untuk mempromosikan visi, dan misi, serta programnya kepada masyarakat. Analisis lingkungan daerah pemilihan juga perlu dilakukan untuk mengetahui keluhan serta kebutuhan masyarakat, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Ibu Siti dan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang kemudian mengantarkannya pada kemenangan dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024.

g. Penyiapan anggaran

Kondisi keuangan dalam sebuah partai politik sangat penting dan perlu untuk diperhatikan. Menurut Fred R. David (dalam Wiradika, 2018: 5), dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan suatu partai politik, maka akan dapat memformulasikan strategi yang efektif berdasarkan anggaran yang dimiliki. Apalagi saat mempersiapkan pesta demokrasi, dan turut serta di dalamnya menjadi calon yang akan maju. Semua anggarannya harus benar-benar diperhitungkan. Hal ini pun berlaku dalam pemilu tahun 2019 di Kota Surabaya, khususnya dalam

pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya. Apabila penjelasan diatas dikaitkan dengan hasil wawancara terhadap Ibu Hj. Siti Mariyam, diperoleh keterangan bahwa:

“Pada periode sebelumnya DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meminta para calon legislatif yang mencalonkan diri untuk membayar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk membayar saksi. Namun saat ini hal tersebut telah dihapuskan, untuk kegiatan kampanye ditanggung oleh masing-masing calon yang maju. Terkadang juga ada iuran dari calon legislatif untuk membayar saksi, dan akan diganti apabila calon legislatif tersebut berhasil memenangkan pemilu”. (Senin, 19 Agustus 2021 Pukul 15.45 WIB).

Pernyataan lain juga ditambahkan oleh Mas Akhmad Hidayat bahwa, biasanya anggaran partai yang paling besar keluar adalah pada saat menyelenggarakan kampanye akbar untuk mendukung seluruh caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan hal yang vital, dan perlu diperhitungkan dalam menyelenggarakan program, salah satunya dalam kegiatan pemilu. Anggaran yang dikeluarkan oleh para caleg dan PDI Perjuangan Kota Surabaya rata-rata dialokasikan untuk membayar saksi, kampanye, dan lain sebagainya. Bahkan, para caleg dari partai ini tidak dipungut mahar politik oleh partainya, jadi anggarannya berasal dari dana pribadi dan digunakan untuk kepentingan kampanye pribadi.

h. Pemanfaatan sistem informasi

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu di bidang politik. Banyak kegiatan politik yang dibagikan oleh partai politik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Apalagi, pada saat mendekati pesta demokrasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini para caleg dan partai politik lebih memilih mengkampanyekan diri, dan membagikan kegiatannya melalui media sosial, agar dapat langsung ditonton oleh masyarakat luas.

Hal serupa pun juga dilakukan oleh caleg dan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa kegiatan promosi dan penyampaian program kerja maupun berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para caleg, dan partai dibagikan melalui media sosial. Bentuk pemanfaatan media sosial ini seperti *Instagram* yang selalu *update*, *Tik-Tok*, *Whatsapp place*, dan *Facebook*, serta *Twitter*. Tidak jarang pun kegiatan

yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya diliput oleh media, seperti *detik.com*.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa caleg maupun DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya telah dengan maksimal memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal ini terlihat dari postingan yang dibagikan oleh akun media sosial partai dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya seperti di *Instagram*, *tik-tok*, *Whatsapp place*, *Facebook*, dan *Twitter*, serta media lainnya seperti *detik.com* untuk mempromosikan kegiatan caleg maupun program partai lainnya.

i. Menghubungkan kompensasi kader partai dengan kinerja partai politik

Banyak cara yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan kinerja kader partainya. Menurut Fred R. David (dalam Wiradika 2018: 4) salah satu caranya, yaitu dengan memberikan bonus. Sehingga, apabila sebuah partai politik berhasil mencapai tujuan yang telah disepakati, maka setiap kadernya berhak untuk menikmati hasilnya. Sistem bonus menjadi alat yang efektif untuk memotivasi individu guna mendukung upaya-upaya penerapan strategi. Hal ini pun berlaku bagi partai politik. Biasanya, bagi partai politik yang berhasil memenangkan kadernya yang maju dalam pemilihan legislatif, tentu akan mendapatkan *reward* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja partainya. *Reward* ini diberikan oleh caleg yang terpilih kepada partainya, bukan kepada individu. *Reward* ini berupa anggaran yang dimanfaatkan untuk biaya operasional partai. Pernyataan ini kemudian dibenarkan oleh Ibu Hj. Siti Mariyam. Dimana, berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa:

“*Reward* ini dituangkan dalam bentuk kontribusi yang harus diberikan oleh dewan yang terpilih kepada DPC partai. Kontribusi ini nantinya akan disalurkan untuk membantu daerah-daerah lain”. (Senin, 19 Juli 2021 Pukul 15.50 WIB).

Disisi lain, baik Bapak Anas Karno, dan Mas Akhmad Hidayat juga menjelaskan, bahwa:

“Tidak ada *reward* khusus yang diberikan dewan terpilih kepada individu di dalam partai. Namun memang benar adanya, bahwa untuk penghasilan dewan yang terpilih, sekian persen penghasilan tersebut dialokasikan atau dipotong untuk membantu biaya operasional partai, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 12.50 WIB).

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi atau *reward* memang

sangat penting untuk diberikan kepada karyawan untuk menghargai usaha dan kerja kerasnya di dalam organisasi. Dengan diberikannya kompensasi/reward secara tidak langsung dapat memotivasi individu untuk mendukung upaya-upaya penerapan strategi. Apabila pada umumnya reward diberikan kepada individu, lain halnya dengan yang diberlakukan oleh DPC PDI Perjuangan. Dimana kompensasi/reward dari dewan yang terpilih harus diberikan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya untuk membantu biaya operasional partai, dan bukan diberikan kepada individu di dalam partai.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari serangkaian proses manajemen strategik. Menurut Fred R. David (dalam Taufiqurokhman, 2016: 18), evaluasi strategi memiliki peran penting dan harus dilaksanakan untuk menilai sebuah strategi, karena keberhasilan strategi yang diimplementasikan saat ini tidak dapat menjamin keberhasilan strategi di kemudian hari. Adapun indikator-indikator dalam evaluasi strategi, meliputi :

a. Mengkaji ulang faktor eksternal dan internal

Berbagai faktor eksternal dan internal dapat memengaruhi serta menghambat partai politik dalam mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. David, (2006: 443-445) menjelaskan bahwa, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau diimplementasikan dengan sangat buruk, sehingga kegagalan untuk mencapai tujuan bukan sepenuhnya hasil dari pekerjaan pimpinan dan pengurunya yang tidak memuaskan. Peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan masih dirasakan setelah alternatif strategi di atas diimplementasikan. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Mas Akhmad Hidayat, diperoleh keterangan bahwa:

“Setelah alternatif strategi diimplementasikan masih ditemuinya ancaman berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap program dari caleg maupun partai politik, karena hanya dianggap sekedar janji manis saat kampanye. Sehingga, yang bisa dilakukan hingga saat ini adalah dengan tetap terjun ke masyarakat, membantu serta meyakinkan masyarakat bahwa PDI Perjuangan memang ada dan benar-benar ingin membantu dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 15.20 WIB).

Adapun kekuatan yang terbentuk setelah alternatif strategi di atas diimplementasikan. Menurut Ibu Hj. Siti Mariyam, bahwa melalui pelatihan *skill*, dan penilaian yang matang terhadap bakal caleg yang akan maju juga

masih dirasakan. Karena melalui serangkaian proses tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selalu memiliki perwakilan dewan paling banyak dibandingkan dengan partai lainnya. (KPU, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, pemikiran dari kader-kader PDI Perjuangan juga akan selalu diupgrade dengan seadil-adilnya, akuntabel dengan menjunjung tinggi integritas.

Di sisi lain, untuk kelemahan partai juga masih ditemukan setelah alternatif strategi diterapkan, yaitu mengenai rasa solid yang masih belum maksimal terbentuk di dalam DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sehingga, sering ditemui bahwa antar banteng/kader partai saling bertabrakan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selalu mengadakan rapat evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat hasil kinerja para kader partainya.

b. Mengukur kinerja

Mengukur kinerja sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi. David, (2006: 445-446) menjelaskan bahwa, aktivitas mengukur kinerja organisasi memang penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, dan mengevaluasi kinerja individu, serta menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini pun berlaku bagi partai politik. Dimana, salah satu indikator keberhasilan partai politik dapat dilihat melalui jumlah perwakilan partai yang duduk di kursi dewan. Hal yang sama pun dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, khususnya bagi caleg perempuan di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Akhmad Hidayat, diperoleh hasil bahwa:

“Untuk keterwakilan perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan 5 Kota Surabaya masih stabil. Karena dari tahun 2014-2019 hingga 2019-2024, PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 5 Kota Surabaya hanya diwakili oleh 1 (satu) dewan perempuan”. (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 15.25 WIB).

Di sisi lain, Bapak Anas Karno, juga menambahkan keterangan bahwa:

“Beberapa kader perempuan dari DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya duduk di kursi legislatif maupun menjabat sebagai politisi lainnya, dan banyak pula kader perempuan yang menjadi pengurus di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sehingga, di sini terlihat jelas bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berhasil memberikan ruang,

dan tempat terbaik bagi perempuan untuk memperjuangkan kaum perempuan maupun masyarakat Surabaya secara menyeluruh". (Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa baik calon legislatif perempuan, Bappilu maupun DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengukur keberhasilan kinerja partai politiknya melalui keberhasilan partainya dalam meningkatkan pengetahuan, melatih *skill* dan memberdayakan perempuan agar kompeten. Sehingga pada tahun 2019-2024, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berhasil memperoleh kemenangan bagi caleg perempuannya untuk duduk di kursi dewan, khususnya di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya. Dimana, caleg perempuan ini menjadi satu-satunya perempuan yang terpilih diantara 10 caleg laki-laki yang terpilih di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya. Selain itu, dengan banyaknya perempuan yang terlibat, dan menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, ini menandakan bahwa partai ini telah benar-benar membuka ruang bagi perempuan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alternatif strategi yang dirumuskan, dan diimplementasikan oleh calon legislatif, Bappilu maupun DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dalam usaha memenangkan calon anggota DPRD Perempuan dalam pemilu Kota Surabaya tahun 2019, khususnya di daerah pemilihan 5 Kota Surabaya. Beberapa alternatif strategi ini diantaranya adalah strategi dari mulut ke mulut melalui orang terdekat dan tetangga; kebermanfaatn caleg bagi masyarakat, karena dengan bermanfaatnya keberadaan caleg, maka secara tidak langsung masyarakat sendiri yang akan mengkampanyekan caleg tersebut; tidak membeli suara masyarakat, namun mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat; bersosialisasi dan bercengkrama dengan *millenial* melalui *outbond*; serta menjalin kerjasama di internal partai, seperti dengan memanfaatkan suara para kader partai, suara bakal calon yang tidak jadi, dan juga suara partai. Namun dari beberapa alternatif strategi yang telah dirumuskan, dan diimplementasikan, ada salah satu strategi yang kurang maksimal dalam implementasinya, yaitu strategi mendekati diri dengan para millenial melalui *outbond*.

Di sisi lain, adapun kebijakan yang diimplementasikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yaitu pertama, kaderisasi yang wajib diikuti

oleh seluruh kader DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya; dan yang kedua adalah *compeer test* yang berisi seputar tes psikologi, wawancara, bentuk pengabdian si calon legislatif kepada masyarakat, dan keaktifan di dalam berorganisasi bagi kader yang mencalonkan diri untuk maju sebagai calon legislatif. Sehingga, hasil skor dari *compeer test* inilah yang akan menambah bobot dalam susunan calon legislatif. Namun, adapun kelemahan yang tidak bisa dihindari yaitu bersaing dengan rekan satu kandang dan dengan partai yang sama.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas mengenai perumusan, implementasi, serta evaluasi manajemen strategi yang telah dilaksanakan oleh beberapa narasumber diatas. Maka saran penulis, yaitu:

1. Sebelum melaksanakan strategi dengan metode mendekati diri dan menarik suara para milenial melalui *outbond*, sebaiknya melakukan pemetaan dan perhitungan kembali terhadap suara milenial.
2. Menganalisis daerah pemilihan caleg, apakah sudah dikuasai oleh partai lain ataukah belum, karena kebiasaan/budaya maupun latar belakang masyarakat daerah pemilihan perlu untuk diketahui, agar dapat merumuskan dan mengimplementasikan manajemen strategi apa yang cocok untuk daerah pemilihan tersebut.
3. Adanya kelemahan internal yang dihadapi oleh PDI Perjuangan, yaitu kurang terbentuknya rasa solid antar kader partai, bahkan antara banteng/kader terkadang saling bertabrakan. Maka sebaiknya, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sesering mungkin mengadakan kegiatan *outbond* atau *family gathering* bagi para kader partai politik yang bertujuan untuk mendekati, dan memperat rasa kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, Nayla Majesty, and Ratna Riyanti. 2020. "Women As The Victim Of Politics: Experiences In The 2019 Legislative Elections In Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11(5):464, 468-69.
- Alam, Mabrur; Ilham, Lukman. 2016. "Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Studi Pada Kantor DPRD Kota Makassar)." *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 3(2):150-51.
- Budiatri, Aisah Putri. 2012. "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

- Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI Dan DPRD).” *Widyariset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* 15:19–28.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategis: Konsep*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Edward, Jane Kani. 2014. “A Strategy for Achieving Gender Equality in South Sudan.” *Women and Political Participation* 29.
- Fure, Cindy Ignacia; Agustinus B. Pati; Daisy Posumah. 2020. “Strategi PDI-Perjuangan Dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Di Kabupaten Halmahera Barat.” *Jurnal Politico* 9(1).
- Hadi, Sofyan. 2019. “Model Manajemen Strategi Dakwah Di Era Kontemporer.” *Al-Hikmah* 17(2):69–78.
- Inkiriwang, Michael J. .. M. 2021. “Strategi Politik Para Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu 2019.” *Politico* 10(1):1–9.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum). 2018. *Pengumuman Nomor: 1560/PL.01.4-PU/02/Kota/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Surabaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. Surabaya.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum). 2019. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 318/PL.01.9-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. Surabaya.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Surabaya. 2014. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 13/Ktps/KPU-Kota-014.329945/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014*.
- kpujatim.go.id. 2020. “Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Timur : Kajian Tentang Seleksi Perempuan Di Partai Politik.” *Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu* 1–75.
- Manab, Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter, Aniefiok Sunday (PhD), And Uzoma Iteogu, Edith. 2021. “Women and Political Participation In Nigeria (1960-2011): A Critical Appraisal.” *International Journal of Management Studies and Social Science Research* 3(4):217–24.
- Purwanti, Ani. 2016. “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur.” *Masalah-Masalah Hukum* 44(2):189–99.
- Quaye, Isaac, Abraham Osei, Alfred Sarbah, and Eugene Abrokwah. 2015. “The Applicability of the Learning School Model of Strategy Formulation (Strategy Formulation as an Emergent Process).” *Open Journal of Business and Management* 03(02):136–37. doi: 10.4236/ojbm.2015.32014.
- Setiawan, Bayu & Kurniawan, Badrudin. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran Di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Publika*, 9 (3), 409-418.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. 10th ed. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sukiada, I. Nyoman. 2017. “The Strategy At Improving Of Balinese Women Representation In The Legislature.” *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences* 4(1):17. doi: 10.21744/irjmis.v4i1.342.
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Cetakan 1. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Tukiman; Rosida; Andarini, Sonja. 2018. “Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2(2):51–55.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wahyuni, Hasri; Suryanef. 2021. “Strategi Partai Gerindra Dalam Mewujudkan Representasi Perempuan Di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024.” *Journal of Civic Education* 4(3):187–94.
- Wiradika, Elga. 2018. “Implementasi Strategi Dari Perspektif Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Keuangan Dan Operasional (Studi Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6(1):1–12.